



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI**

**(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)**

---

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Sidang     | : 2025-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Masa Persidangan | : II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rapat ke         | : 6 (enam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jenis Rapat      | : Rapat Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dengan           | : 1. Menteri Kesehatan RI<br>2. Ketua DJSN<br>3. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan<br>4. Direktur Utama BPJS Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sifat Rapat      | : Terbuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hari/tanggal     | : Kamis, 13 November 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waktu            | : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1<br>Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acara            | : 1. Evaluasi keberlanjutan JKN dan penyesuaian iuran untuk menjamin pembiayaan berkelanjutan serta peningkatan mutu layanan kesehatan inovatif.<br>2. Penghapusan tunggakan iuran dan penambahan peserta PBI sebagai langkah pemulihan kepesertaan, efisiensi sistem, dan perluasan perlindungan kesehatan bagi masyarakat rentan.<br>3. Percepatan pemerataan layanan dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.<br>4. Implementasi PP No. 28/2024 dengan fokus pada layanan prioritas KJSU, integrasi SATUSEHAT, teknologi inovatif, dan pengembangan layanan lansia. |
| Ketua Rapat      | : Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A./Wakil Ketua Komisi IX DPR RI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sekretaris Rapat | : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Hadir

: A. Anggota DPR RI

31 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI

B. Pemerintah

- Menteri Kesehatan RI RI; Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC., CLU., beserta jajaran.
- Ketua DJSN; Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si, beserta jajaran.
- Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS., beserta jajaran.
- Direktur Utama BPJS Kesehatan; Prof. dr. Ali Ghufroon Mukti, MSc, PhD, beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Ketua DJSN, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 14.00 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama-sama dengan DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk segera mengeluarkan regulasi dan petunjuk teknis untuk penghapusan tunggakan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan yang non-aktif dan terbukti tidak mampu, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan harus tepat sasaran.
2. Dalam rangka memastikan keberlanjutan program JKN, Komisi IX DPR RI mendesak:
  - a. DJSN secara hati-hati mengkaji tindakan khusus dalam menjaga Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyesuaian besaran iuran, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa menurunkan kualitas manfaat program JKN;
  - b. Kementerian Kesehatan RI berkomitmen menjaga ketersediaan dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk pemenuhan SDM kesehatan, sarana-prasarana, agar peningkatan kepesertaan JKN sejalan dengan kemampuan sistem pelayanan kesehatan dalam menyediakan layanan yang bermutu;

- c. Kementerian Kesehatan RI bersama Kementerian/Lembaga terkait memperkuat upaya promotif dan preventif secara terstruktur dan masif, guna menekan beban pembiayaan kuratif dan mengantisipasi pergeseran pola penyakit yang berdampak besar pada utilisasi dan DJS Kesehatan;
  - d. Kementerian Kesehatan RI berkomitmen untuk meniadakan penolakan layanan oleh fasilitas kesehatan, serta meningkatkan pengawasan terhadap mutu layanan, waktu tunggu, dan implementasi sistem rujukan agar lebih efisien dan berkeadilan;
  - e. BPJS Kesehatan mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kolektibilitas iuran peserta melalui intensifikasi edukasi dan kunjungan langsung oleh petugas dan kader JKN;
  - f. BPJS Kesehatan melakukan pendampingan kepada fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit, agar proses pengajuan klaim berjalan sesuai ketentuan, sehingga klaim dapat dibayarkan tepat waktu dan tidak terjadi penolakan klaim.
3. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN dalam melakukan kajian penyesuaian besaran iuran JKN memastikan bahwa ada indikator peningkatan kualitas pelayanan kesehatan JKN.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya secara tepat, proporsional, dan berbasis teknologi kesehatan, guna peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara:
- a. Memperkuat regulasi Penilaian Teknologi Kesehatan (*Health Technology Assessment/HTA*), dengan memberi ruang stakeholder melakukan kajian HTA mandiri;
  - b. Melakukan perbaikan menyeluruh terhadap mekanisme Fornas, khususnya terkait ketersediaan obat yang masih banyak dikeluhkan masyarakat, termasuk akses terhadap obat inovatif;
  - c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan Fornas dan evaluasi teknologi kesehatan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.17 WIB.

Jakarta, 13 November 2025

KETUA RAPAT,

ttd

Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.  
A-42

KETUA DJSN,

ttd

MENTERI KESEHATAN RI,

ttd

Prof. Dr. Ir. R. NUNUNG NURYARTONO, M.Si,

BUDI GUNADI SADIKIN

DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN,

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN,

ttd

ttd

Prof. dr. ALI GHUFRON MUKTI, MSc, PhD

Prof. Dr. ABDUL KADIR, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS.